

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Agraria 1870 yang diberlakukan pada masa Hindia Belanda menjadi tonggak penting dalam perkembangan perkebunan kolonial di Indonesia. Melalui undang-undang ini, tanah-tanah yang dianggap sebagai *domein* atau milik negara dapat disewakan kepada pengusaha swasta Eropa dalam jangka waktu panjang, hingga 75 tahun. Kebijakan ini membuka peluang besar bagi berkembangnya perkebunan tebu, kopi, tembakau, dan komoditas ekspor lainnya. Namun, bagi rakyat pribumi, UU Agraria 1870 justru memperkuat ketidakadilan karena akses terhadap tanah semakin terbatas.¹ Rakyat kecil seringkali kehilangan lahan pertanian mereka akibat sistem sewa yang lebih menguntungkan pengusaha kolonial, sehingga menimbulkan eksploitasi tenaga kerja dan memperdalam jurang sosial-ekonomi.²

Pada masa orde lama, khususnya setelah kemerdekaan, ditandai dengan upaya pemerintah membangun sistem agraria nasional yang tidak lagi didasarkan pada hukum kolonial. Salah satu kebijakan pentingnya adalah UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam praktiknya, proses penataan kembali penguasaan tanah membuat

¹ Masyrullahushomad dan Sudrajat, 2020, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa", *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No. 2, hlm. 159.

² *Ibid.*

sebagian tanah yang sebelumnya berada dalam penguasaan masyarakat adat kemudian masuk ke dalam pengaturan dan penguasaan negara.³

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) Tahun 1960 pada dasarnya tidak menghapus tanah ulayat. UUPA justru mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Namun, konsep Hak Menguasai Negara memberikan kewenangan besar kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan hubungan hukum atas tanah. Dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan ini dapat menjadi dasar bagi pengambilalihan atau pemberian hak atas tanah untuk kepentingan negara dan pembangunan.⁴

Nasionalisasi terutama terjadi terhadap perusahaan-perusahaan dan perkebunan asing setelah kemerdekaan, terutama pada akhir 1950-an. Tanah dan aset perkebunan yang sebelumnya dikuasai perusahaan kolonial kemudian beralih kepada negara dan dikelola melalui perusahaan perkebunan negara. Dalam proses tersebut, tanah yang sebelumnya memiliki hubungan dengan masyarakat setempat atau tanah ulayat dapat mengalami perubahan status penguasaan karena masuk ke dalam kawasan perkebunan negara.⁵

Pada masa Orde Baru 1966-1998, pola perkebunan kolonial warisan Belanda tidak sepenuhnya hilang, melainkan direproduksi dengan wajah baru.⁶

³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960”

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_5_Tahun_1960, diakses pada, 14 Agustus 2026 pukul 06.00

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Sufriadi dan Yanto, 2022, “Kebijakan dan Praktek Kemitraan Era Orde Baru Serta Rekonstruksi Kebijakan Era Reformasi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 29 No. 1, hlm. 142-165.

Pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor pertanian dan perkebunan dengan dukungan modal asing. Melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), negara berupaya mengintegrasikan petani dengan perusahaan besar dalam sistem inti-plasma. Walaupun, pada satu sisi kebijakan ini meningkatkan produksi dan devisa negara, pada sisi lain praktiknya sering kali menimbulkan konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, serta marjinalisasi masyarakat lokal. Dengan demikian, baik pada masa kolonial Belanda maupun Orde Baru, sistem perkebunan lebih banyak berpihak pada kepentingan pemodal besar ketimbang kesejahteraan rakyat kecil.⁷

Komoditas yang mengalami perkembangan paling pesat pada masa Orde Baru adalah kelapa sawit. Sejak 1970-an, pemerintah membuka perkebunan kelapa sawit secara besar-besaran, terutama di Sumatra dan Kalimantan.⁸ Untuk mendukung hal ini, pemerintah meluncurkan program Perkebunan Inti Rakyat (PIR), yaitu kerja sama antara perusahaan besar sebagai inti dengan petani kecil sebagai plasma. Melalui program ini, petani mendapat bibit, pembinaan, dan akses pasar, sementara perusahaan memperoleh pasokan bahan baku dari lahan plasma.⁹

Pembukaan lahan sawit di Sumatra pada masa Orde Baru membawa dampak besar, baik dari sosial, maupun sisi ekonomi. Lapangan pekerjaan di pedesaan juga semakin terbuka.¹⁰ Terbukanya lapangan pekerjaan mendorong

⁷ *Ibid.*

⁸ **I.Pahan**, *Pengembangan Klaster Industri Kelapa Sawit di Indonesia*. (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011).

⁹ “Sejarah Perkembangan Kelapa Sawit di Indonesia: Dari Tanaman Hias hingga Pilar Ekonomi”. <https://www.dewantaranews.com/nasional/89914282397/sejarah-kelapa-sawit-di-indonesia-dari-tanaman-hias-hingga-komoditas-andalan-dunia>. Diakses pada tanggal 25 September 2025, Pukul 14:26.

¹⁰ Nurhalimah dan Aliman Syahuri Zein, 2019, “ Analisis Produksi Sawit Di Sumatera Barat”, *Al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 7 No. 2, hlm. 320-336.

terjadinya migrasi penduduk ke wilayah perkebunan sawit, seperti Jawa, Jambi, Medan, Palembang, dan Sumatera Barat, untuk menetap maupun bekerja secara sementara di wilayah tersebut.¹¹

Salah satu Perusahaan kelapa sawit yang berdiri di Pulau Sumatra pada masa Orde Baru yaitu PT TKA. PT TKA merupakan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan model Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PT TKA didirikan oleh Hashim Djojohadikusumo.¹² Pembukaan lahan kebun PT.TKA dimulai pada tanggal 15 Januari 1986 dan tanam perdana pada Desember 1986 sampai 1997 telah tertanam pohon sawit seluas 16.048,9 ha.¹³ Kemudian, penanaman kelapa sawit di Dharmasraya dilanjutkan tahun 2002-2003 dan 2007- 2011, sehingga total luas lahan tertanam pohon sawit 28.029 ha.¹⁴

Nagari Lubuk Besar sebagai salah satu lokasi lahan perkebunan sawit PT.TKA, sebelum berstatus sebagai nagari, Lubuk Besar dikenal sebagai kawasan permukiman yang berbentuk jorong dalam administrasi Nagari Sungai Limau, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Namun, pada tahun 2009 penamaan dan status administratif sebagai Nagari Lubuk Besar di bawah Kecamatan Asam Jujuhan secara resmi baru digunakan setelah penataan wilayah tersebut.¹⁵

¹¹ *Ibid.*

¹² PT TKA, Kesepakatan Kerja Bersama PT Tidar Kerinci Agung 1997-1998. (Padang: Departemen Tenaga Kerja, 1997), hlm. 2.

¹³ Sofi Satria Pribadi, 2019, “Pengelolaan kebun kelapa sawit oleh PT Tidar Kerinci Agung di kecamatan asam jujuhan Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat” *Skripsi* (Jambi: Jurusan Agroekoteknologi Fakultas Pertanian)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Nomor 4 Tahun 2009 **Pembentukan dan Penataan Nagari.**

PT TKA mulai beroperasi secara resmi pada tahun 1986, setelah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) untuk membuka perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Sijunjung, yang sekarang perkebunan tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya. Hal itu terjadi setelah pemekaran Kabupaten Sijunjung tahun 2004. PT TKA menerapkan model inti-plasma yaitu adanya kebun inti dan kebun plasma sejak tahun 2001. Kebun Inti yaitu kebun yang langsung dikelola oleh PT.TKA, sedangkan kebun Plasma yaitu perkebunan yang dikelola oleh petani lokal (masyarakat sekitar).¹⁶

Inti plasma tersebut menghasilkan pola Interaksi antara masyarakat Lubuk Besar dengan PT.TKA terwujud melalui berbagai bentuk kemitraan. Perusahaan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, mulai dari pekerja lapangan, tenaga harian lepas, mandor, hingga staf. Kehadiran PT.TKA turut mendorong peningkatan daya beli masyarakat, kemudian menumbuhkan aktivitas ekonomi baru, seperti warung, usaha transportasi, maupun perdagangan kecil.¹⁷

Pembangunan infrastruktur perkebunan, terutama jalan, semakin memudahkan warga dalam mengakses pasar untuk menjual hasil pertanian mereka. Selain itu, masuknya pekerja dari luar daerah menciptakan permintaan tambahan terhadap barang dan jasa. Aktivitas ekonomi PT TKA juga berkontribusi pada

¹⁶ Kennial Laia, “Menyoal Kemitraan Inti Plasma Bisnis Kelapa Sawit” <https://papua.betahita.id/news/detail/6722/menyoal-kemitraan-inti-plasma-bisnis-kelapa-sawit.html?v=1728113042>. Diakses pada tanggal 25 September 2025, Pukul 20:07.

¹⁷ R.A.R, Dewi, H.J, Tou dan W.W, Wahyudi, 2018, “Analisis Pengaruh Perkebunan Kelapa Sawit PT Tidar Kerinci Agung Terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus : Nagari Talao Sungai Kunyit Kabupaten Solok Selatan)”, *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*, vol.2 No.3, hlm.131

pemasukan desa dan pajak daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah.¹⁸ Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), PT TKA turut mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial, seperti melalui pemberian beasiswa, layanan kesehatan gratis, serta bantuan bagi kegiatan keagamaan, dan olahraga.¹⁹

Pada tahun 2018 menjadi titik balik bagi perjalanan PT TKA di Lubuk Besar. Setelah lebih dari tiga dekade (1986-2018) mengelola perkebunan sawit, perusahaan ini beralih kepemilikan ke Asian Agri Grup (PT TKA-AAG).²⁰ PT TKA-AAG mulai mengimplementasikan manajemen baru yang berorientasi pada keberlanjutan dan sertifikasi standar global. Sementara masyarakat setempat menyaksikan berakhirnya era panjang penguasaan PT.TKA kemudian lahirnya fase baru dalam pengelolaan perkebunan sawit tersebut oleh PT TKA-AAG di Nagari Lubuk Besar.²¹ Sejak pengambilalihan perkebunan sawit oleh Asian Agri Grup melakukan kebijakan perusahaan dengan tetap memakai nama PT TKA, sehingga perkebunan dikelola oleh PT TKA-AAG.²²

Asian Agri grup adalah salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang memproduksi minyak sawit mentah melalui perkebunan yang dikelola secara berkelanjutan. Berdiri sejak tahun 1979, PT TKA Asian Agri saat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “PT TKA Bangun Jembatan Air Sungai Jernih dan Akses Jalan Lubuk Besar–Asam Jujuhan”. <https://scientia.id/2025/06/23/pt-tka-bangun-jembatan-air-sungai-jernih-dan-akses-jalan-lubuk-besar-asam-jujuhan/>. Diakses pada tanggal 25 September 2025, Pukul 21.47.

²⁰ Tommy Pardede, “Siapa Pemilik PT Tidar Kerinci Agung yang Kerap Dikaitkan dengan Prabowo” <https://www.sawitku.id/nasional/81416495261/siapa-pemilik-pt-tidar-kerinci-agung-yang-kerap-dikaitkan-dengan-prabowo> Diakses pada tanggal 25 September 2025, Pukul 21.49

²¹ Ida Kurnia Saragih dan Bayu, 2020, “Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Provinsi Jambi”, *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 8 No. 1, hlm 17-32.

²² *Ibid.*

ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Asia yang mengelola perkebunan kelapa sawit seluas 100.000 hektar di Sumatera Utara, Riau dan Jambi. Asian Agri Grup didukung oleh 22.321 orang karyawan yang bergabung dan berkembang bersama perusahaan.²³

Seiring dengan perubahan sistem pengelolaan perusahaan, pola kemitraan yang dijalankan PT TKA-AAG cenderung lebih menguntungkan pihak perusahaan karena harga tandan buah segar sepenuhnya ditentukan oleh manajemen, sehingga posisi tawar petani plasma semakin lemah. Selain itu, aturan operasional yang lebih ketat membuat pekerja lapangan menghadapi target produksi yang tinggi dengan status kerja yang tetap tidak pasti, terutama bagi buruh harian lepas.²⁴

Peralihan manajemen juga tidak sepenuhnya memperluas akses masyarakat terhadap lahan plasma, bahkan sebagian klaim tanah ulayat tidak terakomodasi, yang menimbulkan rasa tidak puas di kalangan masyarakat adat. Dari sisi ekonomi, keuntungan terbesar lebih banyak dinikmati perusahaan dan kelompok kecil pekerja tetap, sedangkan buruh lapangan masih bergelut dengan pendapatan rendah di tengah meningkatnya biaya hidup. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial serta memunculkan konflik. Pekerja tidak memperoleh jaminan sosial dan kesejahteraan yang layak, sehingga muncul kesan bahwa perusahaan lebih menekankan produktivitas dari pada kepentingan buruh. Salah satu rasa kecewa tersebut menimbulkan Ketegangan antara warga Nagari

²³ “Meningkatkan Kehidupan Dengan Meningkatkan Sumber Daya Secara Berkelanjutan” <https://www.asianagri.com/en/>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2025, Pukul 18:39.

²⁴ Dicky Krisnandi, 2022, “Pola Kemitraan Petani Kelapa Sawit dengan Perusahaan Kelapa Sawit (Studi Pada PT. Bumitama Gunajaya Abadi, Desa Desa Riam Durian, Kotawaringin Lama, Kalimantan Tengah)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Stiper).

Lubuk Besar dengan pihak Asian Agri sehingga terjadi aksi unjuk rasa akibat persoalan minimnya jam kerja yang diberikan kepada pekerja lokal. Warga menilai perusahaan tidak memberikan kesempatan kerja yang seimbang, meskipun beroperasi di atas tanah ulayat dan telah lama beraktivitas di wilayah mereka.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas, menarik untuk diteliti tentang peralihan Perkebunan sawit di Nagari Lubuk Besar dari PT TKA ke PT TKA-AAG yang membawa perubahan terhadap hubungan perusahaan dengan buruh dan masyarakat Nagari Lubuk Besar. Penelitian ini difokuskan kepada respons masyarakat dan buruh terhadap peralihan perkebunan sawit di Nagari Lubuk Besar dari PT.TKA ke PT.TKA-AAG 1986-2024.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Permasalahan utama dari penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara buruh dan masyarakat Nagari Lubuk Besar dengan PT.TKA dan PT.TKA-AAG. Untuk memfokuskan kajian ini diajukan beberapa perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan geografis dan penduduk Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan, pada masa PT TKA?
2. Bagaimana peralihan perkebunan sawit di Nagari Lubuk Besar dari PT TKA ke PT TKA-AAG?
3. Bagaimana komparasi dan Respons Masyarakat Nagari Lubuk Besar Terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit PT TKA dan PT TKA-AAG?

²⁵ Dian Cahyaningrum, 2022, "Pemanfaatan Tanah Adat Untuk Kepentingan Penanaman Modal di Bidang Perkebunan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13 No. 1, hlm. 21-40.

Batasan spasial penelitian ini memfokuskan pada perkebunan sawit PT.TKA yang berada di wilayah Nagari Lubuk Besar, di Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Sinjunjung (1986-2004), Sumatera Barat. Batasan temporal penelitian ini dimulai pada tahun 1986 sampai dengan 2024. Pada tahun 1986 merupakan titik awal PT.TKA mulai beroperasi. Tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir penelitian untuk melihat respons buruh dan masyarakat terhadap berbagai kebijakan PT TKA-AAG setelah perusahaan tersebut mengambil alih pengelolaan PT TKA pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul Respons Masyarakat Terhadap Peralihan Perkebunan Sawit dari PT.TKA ke PT.Asian Agri di Nagari Lubuk Besar Kabupaten Sijunjung (1986-2024) memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan mengenai Nagari Lubuk Besar dalam perspektif kajian historis yang penjelasannya didalamnya terkait dalam geografis, penduduk, sosial, budaya dan ekonomi
2. Menjelaskan sejarah dan berkembangnya perkebunan sawit PT TKA pada tahun 1986-2018 dan menjelaskan mengenai peralihan ke PT TKA Asian Agri Grup 2018-2024
3. Mengkaji komparasi dan Menganalisis respons masyarakat Nagari Lubuk Besar terhadap keberadaan dan perubahan pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TKA menjadi PT TKA-AAG.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian ini menguraikan berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji, seperti respons sosial masyarakat, hubungan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat lokal, serta dampak sosial ekonomi dari aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Buku yang ditulis oleh Renville Siagian yang berjudul “182 Tahun Perkebunan Di Indonesia (1830-2012)”.²⁶ Buku ini menguraikan perjalanan panjang perkebunan Indonesia sebagai pilar pembangunan Ekonomi Nasional. Pada hakekatnya perkebunan Indonesia telah tumbuh dan berkembang dari zaman kolonialisme. Dalam buku ini penulis berupaya untuk menyampaikan sejarah dan dinamika perkembangan perkebunan Indonesia. Meski demikian pembangunan perkebunan telah diawali oleh seluruh rakyat yang mengalami kepedihan dan keputusan ketika bangsa asing menginjakkan kaki di bumi nusantara melakukan tanam paksa (*culturstelsel*). Namun tak sekedar kepedihan yang dirasakan dengan terjadinya peristiwa itu maka saat ini Indonesia bisa mengenal dan memahami cara berbudidaya berbagai tanaman perkebunan hingga akhirnya Indonesia menjadi negara penghasil perkebunan terbesar di dunia khususnya pada komoditas kelapa sawit.

Skripsi yang ditulis oleh Jola Adila Haya yang berjudul “Tandan Berduri: (Pekerja PT. Tidar Kerinci Agung di Nagari Talao Sungai Kunyit, Kabupaten Solok Selatan 2007-2018)”, Universitas Andalas.²⁷ Skripsi ini mengkaji mengenai

²⁶ Renville Siagian, *182 Tahun perkebunan di Indonesia (1830-2012)*, (Yogyakarta: Yayasan Cempaka Kencana, 2014).

²⁷ Jola Adila Haya, 2022, “Tandan Berduri: Pekerja PT. Tidar Kerinci Agung di Nagari Sungai Kunyit, Kabupaten Solok Selatan (2007-2018)”, *Skripsi* (Padang: Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Andalas).

bentuk-bentuk kesejahteraan yang diberikan pemilik PT Tidar Kerinci Agung yang selanjutnya di sebut PT TKA kepada pekerjanya. Pekerja merupakan salah faktor yang berpengaruh dalam perusahaan, karena tanpa ada pekerja aktivitas dan operasional perusahaan tidak dapat berjalan dan dapat menyebabkan kerugian, karena pekerja memiliki tugas untuk menjalankan segala aktivitas perusahaan sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, untuk menghargai usaha pekerja, perusahaan harus memenuhi hak-hak mereka dan memperlakukan pekerja dengan baik agar pekerja tetap semangat dalam menjalankan tugas mereka.

Artikel yang ditulis Masyrullahushomad dan Sudrajat “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa”.²⁸ Artikel ini membahas tentang Pasca kerja paksa, sistem politik dan kebijakan pertanahan di Hindia Belanda memasuki era ekonomi liberal. Perdebatan di parlemen Belanda tentang investasi perkebunan besar menghasilkan Agrarische Wet 1870 atau Undang-Undang Agraria. Undang-undang ini memberi peluang bagi pihak swasta Eropa untuk berinvestasi di tanah jajahan. Sejak diberlakukan, para pengusaha perkebunan memperoleh keuntungan besar melalui sistem kolonial super profit, yakni akumulasi modal tinggi dengan tenaga kerja murah dan jam kerja panjang. Infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi dibiayai oleh pajak penduduk jajahan. Dengan demikian, beban pembangunan ditanggung oleh rakyat kolonial. Agrarische Wet 1870 menjadi dasar

²⁸ Masyrullahushomad dan Sudrajat, 2020, “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa”, *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 7 No. 2, hlm. 159.

hukum bagi penguasaan tanah oleh perusahaan kapitalis Eropa selama lebih dari 70 tahun.

Artikel yang di tulis oleh Zaiyardam Zubir “Penguasa, Pengusaha, Dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani di Indragiri Hulu, Riau, 1978-2010”.²⁹ Berisi tentang Penderitaan yang kerap kali dirasakan oleh pekerja di perkebunan kelapa sawit, salah satunya dirasakan oleh para pekerja diperkebunan kelapa sawit yang berada di Indragiri Hulu, Riau pada tahun 1978-2010. Pada tahun 1978-2010, pekerja di perkebunan kelapa sawit Indragiri Hulu, Riau dirampas tanahnya dan dieksploitasi menjadi pekerja yang tersiksa di atas bekas tanah mereka sendiri.

Artikel yang ditulis oleh Robby Aris Susanto dan Midiansyah Effendi “Persepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Kasus PT. Telen Prima Sawit di Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur)”.³⁰ Artikel ini berisi tentang salah satu komoditas perkebunan utama di Indonesia karena memiliki produktivitas tinggi, orientasi ekspor, daya saing kuat, serta manfaat yang luas . Kalimantan Timur, kelapa sawit menjadi komoditas unggulan selain karet, kakao, dan lada. Sejak dirintisnya Proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) pada tahun 1982 oleh PTP VI, luas areal dan produksi kelapa sawit terus meningkat. Tahun 2016, luas

²⁹ Zayardam Zubir, 2017, “Penguasa, Pengusaha, dan Petani: Kapitalisme Perkebunan Sawit, Distorsi Sosial Ekonomi, dan Perlawanan Petani Di Indragiri Hulu, Riau 1978-2010”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol.43 No.1, hlm.138.

³⁰ Robby Aris Susanto dan Midiansyah Effendi, 2019. “Presepsi Masyarakat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pasca Berdirinya Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit: PT. Telen Prima Sawit Kecamatan, Muara Bengkal Kabupaten, Kutai Timur. *Jurnal Agribisnis, komunikasi dan pertanian*, Vol. 2 No. 1, hlm.71-78.

perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur mencapai 827.347 hektar, terdiri dari lahan plasma, BUMN, dan perkebunan swasta. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mencanangkan Program Penanaman Sejuta Hektar Kelapa Sawit pada tahun 1997 untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Kutai Timur, pengembangan kelapa sawit menjadi bagian dari program *Gerbang Taman Makmur* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik investasi di subsektor perkebunan.

Artikel yang ditulis Aries Budi Widodo dan Mahagiyani “Analisis kebangkrutan dan mitigasi risiko pada perusahaan Perkebunan”.³¹ Artikel ini berisi tentang sektor utama dalam perekonomian Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan perkebunan meliputi pengelolaan tanaman tertentu dengan dukungan ilmu pengetahuan, teknologi, modal, dan manajemen untuk menghasilkan barang dan jasa bernilai ekonomi. Seiring waktu, peran perkebunan semakin signifikan, terutama akibat krisis energi global yang menjadikan sektor ini berperan strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan, pakan, dan energi (*food, feed, and fuel*). Selain itu, subsektor perkebunan juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui APBN dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Artikel yang di tulis oleh Irsyadi Siradjuddin “Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten Rokan Hulu”.³² Artikel ini membahas tentang Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan dan strategis di

³¹ Aries Budi Widodo dan Mahagiyani, 2022, “Analisis Kebangkrutan dan Mitigasi Risiko Pada Perusahaan Perkebunan”, *Jurnal pengelolaan perkebunan*, Vol. 3 No.1, hlm. 25-35.

³² Irsyadi Siradjuddin, 2015 “ Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Wilayah Di Kabupaten, Rokan Hulu”, *Jurnal Agroteknologi*, Vol. 5 No. 2, hlm. 7-14.

Kabupaten Rokan Hulu karena berperan besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya petani perkebunan. Tanaman ini menjadi andalan warga pedesaan karena kondisi wilayah Rokan Hulu yang sangat cocok untuk pengembangan perkebunan. Berdasarkan data BPS (2012), luas perkebunan kelapa sawit meningkat dari 227.029 hektar pada tahun 2005 menjadi 422.743 hektar pada tahun 2011, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 32 ribu orang. Pembangunan sektor ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan petani, membuka lapangan kerja, dan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah serta produk domestik bruto. Selain itu, kegiatan perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan dampak positif bagi perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya.

Artikel yang ditulis Almasdi Syahza “Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit”.³³ Artikel ini membahas tentang upaya Pemerintah Daerah Riau dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui pembangunan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit. Program pembangunan daerah Riau berlandaskan pada kebijakan **K2I** (pemberantasan kemiskinan, kebodohan, dan pembangunan infrastruktur), yang diarahkan untuk memanfaatkan potensi unggulan daerah. Kelapa sawit diprioritaskan karena kondisi geografis Riau yang datar dan subur, sehingga efisien dalam pengelolaan dan menghasilkan produktivitas tinggi. Selain itu, lokasi Riau yang strategis dekat pasar internasional seperti Singapura serta keterlibatan dalam kerja sama ekonomi regional dan membuka peluang ekspor yang luas. Secara

³³ Almasdi Syahza, 2011, “Percepatan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit”, *Jurnal ekonomi pembangunan*, Vol.12 No. 2, hlm 297-310.

ekonomi, kelapa sawit terbukti memberikan pendapatan lebih besar bagi petani dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya, menjadikannya penggerak utama pembangunan ekonomi daerah.

Artikel yang berjudul “Meningkatkan kehidupan dengan meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan”.³⁴ Artikel ini menjelaskan bahwa Asian Agri mengelola 30 perkebunan kelapa sawit dengan total luas sekitar 100.000 hektar di Sumatera Utara, Riau, dan Jambi, serta bermitra dengan petani swadaya yang mengelola lebih dari 60.000 hektar melalui skema plasma. Fokus utama kemitraan ini adalah meningkatkan kemampuan teknis, finansial, dan keberlanjutan petani melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan standar produksi minyak sawit yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di seluruh rantai pasoknya. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Asian Agri telah memperoleh berbagai sertifikasi internasional, seperti RSPO, ISCC, dan ISPO, yang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam menjalankan praktik perkebunan sawit berkelanjutan.

Artikel berjudul “Sawit rakyat untuk masyarakat”.³⁵ Artikel ini berisi tentang Besarnya potensi industri kelapa sawit di Indonesia mendorong pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendukung pengembangannya. Lembaga ini merupakan unit noneselon di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengelola dana perkebunan sawit dan

³⁴ “Meningkatkan kehidupan dengan meningkatkan sumber daya secara berkelanjutan” <https://www.asianagri.com/en/>. Diakses pada tanggal, 3 Oktober 2025, Pukul 20:39.

³⁵ Sawit rakyat untuk masyarakat. [https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sawit-rakyat-untukmasyarakat.Sawit Rakyat untuk Masyarakat.Artikel](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/sawit-rakyat-untukmasyarakat.Sawit%20Rakyat%20untuk%20Masyarakat.Artikel). Diakses pada tanggal 4 Oktober 2025, Pukul 16:40.

bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Dalam menjalankan fungsinya, BPD PKS bekerja berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh komite pengarah yang sejalan dengan program pemerintah. Komite tersebut terdiri dari delapan kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai ketua, serta Kementerian Keuangan, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, ESDM, BUMN, dan Bappenas yang berperan dalam mengarahkan pengelolaan dana perkebunan sawit secara terpadu.

Artikel yang berjudul “Industri kelapa sawit Indonesia menjaga keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan”.³⁶ Berisi tentang Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil (CPO) dan 8,11 juta ton palm kernel oil (PKO). Jumlah produksi tersebut berasal dari Perkebunan Rakyat sebesar 16,8 juta ton (35%), Perkebunan Besar Negara sebesar 2,49 juta ton (5%), dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 29,39 juta ton (60%).

Berdasarkan kajian pustaka diatas terlihat pedoman sudah banyak ditulis. Akan tetapi, pada perkebunan sawit di Nagari Lubuk Besar terjadi peralihan

³⁶ “ Industri kelapa sawit Indonesia menjaga keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan”. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2025, pukul 17: 00.

perkebunan, perubahan kebijakan terhadap masyarakat dan buruhnya, yang membuat berbeda dengan yang lain, jadi penelitian ini penting untuk di lakukan

E. Kerangka Analisis

Penelitian dalam skripsi ini termasuk kedalam penelitian sejarah sosial ekonomi. Sejarah sosial ekonomi merupakan gejala sejarah yang dimanifestasikan dalam aktifitas kehidupan sosial dan aktifitas ekonomi suatu kelompok masyarakat pada masa lalu.³⁷ Perspektif yang digunakan dalam mengkaji sejarah sosial ekonomi masyarakat Nagari Lubuk Besar dalam hubungan dengan perkebunan sawit adalah sejarah komparatif. Sejarah komparatif adalah metode penelitian sejarah yang dilakukan dengan cara menganalisis dan membandingkan berbagai peristiwa sejarah guna memahami pola perkembangan, perubahan, maupun hubungan sebab-akibat yang terjadi dalam masyarakat.³⁸

Perusahaan merupakan sebuah wadah usaha yang memiliki bentuk yang menjalankan kegiatan perekonomian yang mempunyai bentuk hukum tertentu, seperti Perusahaan Dagang (PD), Persekutuan perdata (Matschaap), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (Comanditair Venotschaap- CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi.³⁹ PT TKA dan PTTKA-AAG merupakan bagian dari Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha

³⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 50.

³⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)

³⁹ Pujiyono, *Hukum Perusahaan*, (Surakarta: Indotama Solo, 2014), hlm. 25.

dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Di dalam sebuah perusahaan, terdapat buruh yang berperan sangat penting dalam menjalankan roda produksi dan operasional.

Buruh adalah seseorang yang bekerja dengan mengandalkan tenaga fisik maupun keterampilan untuk memperoleh upah atau gaji dari pemberi kerja. Dalam konteks hubungan kerja, buruh biasanya bekerja di bawah perintah, pengawasan, dan kebijakan suatu perusahaan.⁴⁰ Di PT TKA maupun PT TKA-AAG buruh dibedakan menjadi dua jenis yaitu buruh harian dan buruh tetap. Buruh harian adalah pekerja yang dipekerjakan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau harian lepas, sesuai kebutuhan perusahaan dan bekerja berdasarkan jumlah hari kerja atau banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, sedangkan Buruh tetap adalah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) dan bekerja secara terus-menerus serta memiliki hubungan kerja yang stabil dengan perusahaan. Mereka berkerja dan mendapat gaji bulanan dari perusahaan.

Gaji atau upah adalah imbalan yang diterima pekerja atau buruh dari hasil kerja yang telah dilakukan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Gaji biasanya diberikan kepada karyawan tetap dalam jumlah tetap setiap bulan, tanpa terlalu bergantung pada jumlah jam kerja, sedangkan upah umumnya diberikan kepada pekerja harian atau buruh berdasarkan jumlah jam kerja, hari kerja, atau hasil

⁴⁰ Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), hlm 5

produksi.⁴¹ Hal ini dapat dilihat sebagai hubungan antara buruh dengan manajemen perusahaan.

Kebijakan manajemen perusahaan adalah serangkaian prinsip, pernyataan, arahan, atau aturan yang ditetapkan oleh manajemen untuk memandu dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan agar selaras dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini bertindak sebagai pedoman bagi karyawan untuk membuat keputusan yang konsisten, memastikan efisiensi, mengurangi risiko, dan mempertahankan standar kualitas dalam semua aspek bisnis.⁴² Kebijakan manajemen PT TKA terhadap buruh (1986-2018) berdeda dengan kebijakan PT TKA-AAG (2018-2014). Pada masa PT TKA buruh di sejahterakan, sedangkan PT TKA-AAG buruh dibebankan dengan pekerjaan yang berat dan PT TKA-AAG memposisikan diri sebagai pihak yang kuat. Perbedaan kebijakan tersebut menimbulkan respons masyarakat yang cukup beragam, baik dalam bentuk penerimaan, penyesuaian, maupun penolakan terhadap perubahan sistem pengelolaan yang diterapkan oleh perusahaan.

Respons masyarakat merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang muncul sebagai reaksi terhadap tindakan atau perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Respons tersebut dipengaruhi oleh nilai, norma, pengalaman, kepentingan, dan kondisi sosial ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat.⁴³ Respons masyarakat dapat dibedakan menjadi respons positif dan

⁴¹ Murtadho Ridwan, "Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1. No. 2, Tahun 2013, hlm. 243.

⁴² Agus Hendrayady, *Prinsip-Prinsip Manajemen: Konsep dan Penerapan*, (Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia, 2023).

⁴³ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Rajawali Pers,2017), hlm. 34.

respons negatif. Respons positif merupakan tanggapan yang menunjukkan penerimaan, dukungan, atau partisipasi masyarakat terhadap suatu kebijakan atau kegiatan, sedangkan Respons negatif merupakan tanggapan yang menunjukkan penolakan, ketidakpuasan, atau kritik terhadap kebijakan maupun aktivitas perusahaan. Bentuknya dapat berupa demonstrasi, penolakan terhadap kebijakan perusahaan dan ketidakpuasan terhadap sistem ketenagakerjaan atau kemitraan.⁴⁴

F. Metode Penelitian dan Bahan Sumber

Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian Sejarah, Metode penelitian sejarah merupakan sebuah metode menggunakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk memahami konteks, faktor penyebab, dan dampaknya. Metode ini melibatkan serangkaian langkah sistematis dalam pengumpulan dan analisis sumber-sumber Sejarah.⁴⁵

Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan tema tulisan yang akan dibuat, tahapan pertama ini disebut dengan heuristik. Dalam pengumpulan sumber, terdapat dua kriteria yang digunakan: sumber primer (utama) dan sumber sekunder (pendukung).⁴⁶ Untuk tema penelitian ini, Sumber primer yang digunakan meliputi arsip-arsip dan foto mengenai PT TKA dan PT TKA-AAG, Selain itu, dilakukan metode sejarah lisan melalui wawancara dengan informan terkait, buruh (Supardi, Zulaini Akbar, Jarno, Rusdiman, Rafindo), tokoh masyarakat (Feliya, Gery, Indah), (pemerintah daerah)

⁴⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 89.

⁴⁵ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 50.

⁴⁶ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), hlm. 31.

Bambang Widodo, staf perusahaan (Sulaiman). Sementara itu, sumber sekunder terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian.

Tahapan kedua adalah kritik sumber, yang bertujuan untuk memverifikasi keaslian sumber sejarah yang telah dikumpulkan.⁴⁷ Pada tahap ini, peneliti memeriksa kesesuaian dan keaslian sumber, dengan membedakan antara kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berfokus pada aspek fisik sumber, seperti jenis kertas, tinta, gaya tulisan, bahasa, dan ungkapan kata-kata, sedangkan kritik intern menilai kredibilitas isi sumber itu sendiri.

Tahapan ketiga adalah interpretasi, yang melibatkan penafsiran dan pengelompokan fakta yang telah diuji sebelumnya. Dapat dibagi menjadi dua jenis: analisis, yang menguraikan data, dan sintesis, yang menyatukan fakta-fakta yang diperoleh. Melalui analisis sintesis, peneliti dapat mengelompokkan fakta-fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang saling menguatkan.⁴⁸

Tahapan keempat adalah historiografi, merupakan rangkaian fakta disusun secara kronologis dan sistematis menjadi sebuah tulisan sejarah. Sasaran akhir dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian adalah mendeskripsikan semua temuan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, historiografi dapat disederhanakan sebagai hasil dari karya sejarah yang telah dituliskan.⁴⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian yang berjudul “Respons Masyarakat Terhadap Peralihan Perkebunan Sawit PT TKA ke PT TKA-AAG di Nagari Lubuk

⁴⁷ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik*, (Gresik: JSI, 2020), hlm. 35.

⁴⁸ Nina Herlina, *op.cit*, hlm. 35.

⁴⁹ Aditia Muara Padiatra, *op.cit*, hlm. 37.

Besar Kabupaten Dharmasraya 1986-2024'' penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab, untuk membuat penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan menguraikan sistematika dalam penulisannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bagian pendahuluan, bab ini menjadi landasan yang berperan penting bagi sebuah penelitian, ini membahas permasalahan yang terkait dengan topik penelitian dan dilengkapi dengan berbagai ulasan, termasuk latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis atau teoritis, metode penelitian, bahan sumber, serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan bagian yang membahas nagari lubuk besar sebagai lokasi perkebunan PT TKA dan PT TKA-AAG yang terdiri dari empat sub bab, yaitu asal usul Nagari Lbuk Besar, penduduk, mata pencarian, dan agama.

BAB III merupakan bagian yang membahas tentang PT. Tidar Kerinci Agung dan PT Tidar Kerinci Agung Asiag Agri Grup di Nagari Lubuk Besar yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu Sejarah PT TKA di Nagari Lubuk Besar, Peralihan PT TKA ke PT TKA-AAG, dan sejarah PT TKA-AAG.

BAB IV merupakan bagian yang membahas tentang komparasi dan Respons Masyarakat Nagari Lubuk Besar terhadap keberadaan dan perubahan pengelolaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT TKA menjadi PT TKA-AAG yang terdiri dari tiga sub bab yaitu manajemen perusahaan, hubungan perusahaan dengan buruh, dan respons masyarakat Lubuk Besar terhadap perusahaan perkebunan. Sub bab A manajemen perusahaan terdiri atas manajemen PT TKA dan manajemen PT TKA-AAG, sub bab B hubungan perusahaan dengan buruh terdiri atas

hubungan perusahaan PT TKA dengan buruh dan hubungan perusahaan PT TKA-AAG dengan buruh.

BAB V merupakan bagian penutup dari pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian.